

ISSN. 2502-7832



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2016

**“EVALUASI PILKADA SERENTAK:
MEMBANGUN KESADARAN POLITIK DAN
KOMUNIKASI PARTISIPATORIS
MENUJU PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN”**

SABTU, 9 APRIL 2016 - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO**

Jl. Budi Utomo 10 Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63471 Telp (0352) 481124 Fax (0352) 462796

ISSN. 2502-7832

Prosiding

SEMINAR NASIONAL & CALL PAPERS 2016

“Evaluasi Pilkada Serentak : Membangun Kesadaran Politik Dan Komunikasi Partisipatoris Menuju Penguatan Tata Kelola Pemerintahan”

Penyunting

1. Dr. Nurul Imam
2. Dr. Bambang Widiyahseno
3. Drs. Jusuf Harsono
4. Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M.Si
5. Dra. Niken Lestarini, M.Si
6. Dian Suluh Kusuma Dewi, S.Sos, M.AP
7. Robby Darwis Nanution, S.IP, M.A
8. Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Penerbit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo - Jawa Timur – Indonesia

Alamat

Jl. Budi Utomo No. 10, Ponorogo – Jawa Timur – Indonesia
<http://semnas.fisip.umpo.ac.id/>

DINAMIKA POLITIK LOKAL

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUH Ponorogo	i
Daftar Isi	vii
A. KOMUNIKASI DAN KEARIFAN LOKAL	
EVALUASI PILKADA SERENTAK: PROBLEMATIKA DARI TRANSISI KE KONSOLIDASI	
Gun Gun Heryanto	1
PROBLEMATIKA KONSELOR SEBAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KONSELING (STUDI KASUS KONSELING SEBAYA DI UNIVERSITY RESIDENCE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)	
Rila Setyaningsih	15
POLITISASI ADAT HIBUA LAMO: PRODUK POLITIK CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MALUKU UTARA	
Frets Alfret Goraph	33
PERAN ELIT LOKAL DALAM KEMENANGAN PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA	
Iqbal Aidar Idrus , Titin Purwaningsih	49
POLITIK INFORMAL DALAM PEMILUKADA 2015 DI BANGKA SELATAN	
David Efendi, Agam Primadi	66
PERAN KOMUNITAS BELAJAR SABALAD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGANDARAN	
Kiki Endah, Endah Vestikowati	96

EFEKTIFITAS *MARKETING* DAN *BRANDING POLITICS* PARA
KANDIDAT KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Neng Suryanti Nengsih, Rendra Setyadiharja, Sharil Budiman, Suherry,
Raja Dachroni 113

PILKADA SEBAGAI PEMBENTUKAN POLITIK KEKERABATAN

Muhtar Haboddin 133

THE TRANSFORMATION OF CIVIC ENGAGEMENT : INDONESIAN
YOUTH PARTICIPATION

Mirza Hardian 147

KEMENANGAN PARTAI ACEH PADA PEMILUKADA GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR ACEH 2012 (Studi Tentang Perilaku Pemilih di
Kabupaten Aceh Selatan)

Mukhrizal, Titin Purwaningsih 163

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK
MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DIKELURAHAN
TANJUNGPINANG KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 KOMUNIKASI
POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

Nur. A. Dwi Putri, Imam Yudhi Prastya 182

PARTISIPASI POLITIK SEMU DALAM PILKADA PONOROGO
TAHUN 2016

Jusuf Harsono 197

IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM
BERPOLITIK

Anip Dwi Saputro 205

PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DALAM <i>MANUNGGALING FIKIRAN LAN ATI ING DALEM SHOLAWAT</i> (MAFIA SHOLAWAT) STUDY FENOMENOLOGI PADA KELOMPOK MAFIA SHOLAWAT DI KABUPATEN PONOROGO	219
Dian Suluh Kusuma Dewi, Lilik Suntari	
KEARIFAN LOKAL KERAJAAN GALUH DALAM MEMBENTUK BUDAYA POLITIK DI KABUPATEN CIAMIS	228
Dini Yuliani, R. Rindu Garvera	
B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	
KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMETAAN HASIL EVALUASI PILKADA	239
Yusuf Adam Hilman	
PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT	251
Khoirurrosyidin	
PENDAMPINGAN PROGRAM JALIN MATRA FEMINISASI KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR DI DESA BANDUNGAN, NGLANDUK, BODAG, SEGULUNG DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015	260
Nanang Cendriono	
PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI SURAKARTA (2005-2012)	282
Muhamad Fajar Pramono	
UPAYA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MELAKUKAN PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN PONOROGO	292
Bambang Widiyahseno	

PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
KOMUNITAS SWALAYAN SURYA DI KECAMATAN PULUNG
SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA SERENTAK

Imam Mahfud 307

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
2015

(STUDI DI DESA BUDUGSIDOREJO KECAMATAN SUMOBITO
KABUPATEN JOMBANG)

Andi Setiawan, Nila Febri Wilujeng 318

PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI
DESA HAMPARAN PERAK

Siti Hajar 330

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM
PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI BERBASIS PARTISIPASI
MASRARAKAT (Studi Kasus : Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta)

Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama 337

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA SUB
TEMA : TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Arif Zainudin, Unggul Sugiharto 353

MERAYAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Irma Fitriana Ulfah 370

STUDI IMPLEMENTASI AZAS TUGAS PEMBANTUAN DAN AZAS
PENUGASAN DALAM PENGUATAN DESA DI KABUPATEN
BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Fernandes Simangunsong 384

UPAYA PUBLIC RELATIONS MELALUI PROGRAM CSR DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL - POLITIK DI MASYARAKAT	401
Yugih Setyanto, Paula T. Anggarina	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WISATA APUNG KAMPOENG RAWA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG	409
Agus Triyono, Muhammad Ali Masyhar	
C. KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU	
PROSES KEBIJAKAN PUBLIK, ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK, POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK, MAKNA DAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK	
Mohammad Ridwan	421
POLITIK PAPAN CATUR	
Persoalan Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur Serentak 2017	
Vellayati Hajad, Ikhsan	430
EKSISTENSI PERAN HUMAS (PUBLIC RELATIONS) PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)	
Veri Setiawan	440
KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN PRODUK KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011-2015)	
Dede Sri Kartini	452
DISKURSUS MEME DALAM EPISTEMOLOGI KOMUNIKASI POLITIK MASYARAKAT DIGITAL	
Anang Hermawan	470

KOMUNIKASI POLITIK DAN PENANDA ZAMAN

(Studi *Branding* Kampanye Politik Indonesia)

Gregorius Genep Sukendro 483

KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL DALAM RITUAL WISUDA WAROK PONOROGO: SUATU KAJIAN ETNOLINGUISTIK

Alip Sugianto 505

INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH: TWITTER UNTUK KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Dzunuwanus Ghulam Manar 517

PENGEMBANGAN MODEL KOMUNIKASI POLITIK GUNA MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK ANARKIS DALAM PILKADA

Ratna Setyarahajoe 537

KOMODIFIKASI *KOREAN WAVE* MELALUI MEDIA DAN IMPLIKASINYA PADA GAYA HIDUP REMAJA INDONESIA

Lusia Savitri Setyo Utami 560

PEMANFAATAN KARIKATUR SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK

Sigit Dwi Laksana 572

KOMUNIKASI POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOKULTURAL

H.H. Daniel Tamburian 583

IMPLEMENTASI DIGITAL PUBLIC RELATIONS (PR)	
(Studi Kasus : Humas Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mensosialisasikan Tagline “Jogya Istimewa”)	595
Adhianty Nurjanah, Friski Yulianti Nurnisya	
PENGARUH PELAYANAN, FASILITAS DAN HARGA TERHADAP KETERTARIKAN PELANGGAN PADA CV. DOOR SMEER KINCLONG MEDAN	
Abdul Haris	613
D. MEDIA, INDUSTRI PROGRAM DAN JURNALISTIK	
KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN	
DI DESA PALUH MANAN	
Irwan Syari Tanjung	643
SURAT KABAR DAN KONVERGENSI MEDIA (STUDI KASUS DI SURAT KABAR HARIAN SOLOPOS)	
Anton Wahyu Prihartono	652
CERMIN RETAK DEMOKRASI: PERS DAN JURNALISME POLITIK “TANPA ISI”	
Hakim Syah	668
PENGARUH KONSUMSI MEDIA DAN INTERAKSI <i>PEERGROUP</i> TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015 DI JAWA TENGAH	
Fitri Norhabiba	684
PERAN MEDIA DALAM DUNIA DAKWAH	
Sutanto	695

CITRA NARSIS CAPRES 2014 DI MEDIA MASSA	
Muhammad Fadeli, Hadi Sutrisno	704
HUBUNGAN MEDIA PENENTU SUARA DALAM KAMPANYE POLITIK	
Nurudin	724
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN PERADABAN UNGGUL	
Rido Kurnianto	741
ANALISA MELEK POLITIK WARGA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014	
Studi Kasus: Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul DIY	
Rosalia Widhiastuti Sri Lestari	750
MAKNA SELFIE DALAM MEMBENTUK KARAKTERISTIK, CITRA, DAN IDENTITAS DIRI PADA IBU RUMAH TANGGA	
Dwi Kartikawati	778
PROSES KREATIF DESAIN SAMPUL BUKU DALAM MEMBANGUN <i>BRAND POSITIONING</i>	
Zein Mufarrih Muktaf	791
DI MANA RAKYAT JAKARTA DI MEDIA?	
(Kontruksi Sosial Warga Jakarta Jelang Pilgub DKI 2017 di Media Detik.com, Kompas.com dan Liputan6.com)	
Farid Rusdi	810

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP/ DALAM KOMUNIKASI POLITIK (Studi Kasus: Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau) Shahril Budiman, Azma Shafariani, Krisna	817
DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT: STUDI TENTANG URUSAN PENDIDIKAN DASAR Aos Kuswandi, Siti Nuraini	833
E. DINAMIKA PARTAI POLITIK	
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT <i>MALPRACTICE</i> H. Ikhsan Yusda. PP	845
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS <i>E-GOVERNMENT</i> STUDI : PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN (UPIK) KOTA YOGYAKARTA Gerry Katon Mahendra	861
POTENSI DAN TANTANGAN PILKADA SERENTAK 2015 Audra Jovani	879
DEMOKRASI LOKAL : DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNGTERHADAP PERILAKU PEMILIH Syafhendry	888
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIBIYAI NEGARA KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU Desna Aromatica	898

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK (ANALISA PENGALAMAN POLITIK PADA PILPRES II PONOROGO TAHUN 2004)	
Happy Susanto	908
EVALUASI SOSIALISASI PEMILIHAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
Bismar Ariyanto	918
HARMONI SUNGAI DAN MANUSIA DALAM TRADISI MERTI CODE POLITIK PELESTARIAN SUNGAI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI YOGYAKARTA	
Suswanta	927
KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL	
Ansar Suherman	935
MERAYAKAN SEPAK BOLA, MERAWAT SEJARAH, MEMBERITAKAN KOTA BERSAMA BAWAH SKOR	
Fajar Junaedi	945
ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN (STUDI HADITH-HADITH RASULULLAH TENTANG <i>AL-IMAM</i> DAN <i>AL-IMAMAH</i>)	
Nurul Iman	960
GAYA KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI: MEMBANGUN KOMUNIKASI ORGANISASI YANG EFEKTIF DI ERAMEA	
Joko Sutarso	968
TRADISI “TORON” : BENTUK KOMUNIKASI KELUARGA DAN KEARIFAN LOKAL MADURA	
Nikmah Suryandari	977

STUDI MODAL SOSIAL KELOMPOK PEREMPUAN PESISIR : UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN KELUARGA MASYARAKAT PESISIR	
Andy Arya Maulana Wijaya	988
PERAYAAN GREBEG SURO SEBAGAI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA PONOROGO (ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA PONOROGO)	
Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih	1001
KOMPETENSI WARTAWAN MEDIA CETAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM	
Marlina	1014
 F. BUDAYA BIROKRASI	
KEKUASAAN CAPITAL : PERSOALAN RUANG PUBLIC (MEDIA) DAN KRISIS DEMOKRASI DI INDONESIA	
Puji Rianto	1029
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) TERHADAP KUALITAS ANAK DIDIK DI SDI PANGGENTUNGAN SELATAN KECAMATAN SOMBAOPU KABUPATEN GOWA	
Nuryanti Mustari, Tahir Tuju	1040
PEREMPUAN DI BALIK POLITIK (ANALISIS TERHADAP KONSTRUKSI PERAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI SUBJEK DAN PENDUKUNG POLITIK PADA PILKADA 2015)	
Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi	1054
POPULARISME DAN PRAGMATISME TAK TERBENDUNG : SEBUAH REFLEKSI POLITIK TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015	
Idil Akbar	1074

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DI ERA PILKADA LANGSUNG	
Ayok Ariyanto	1090
PENATAAN GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI (STUDI KASUS: PROGRAM PATEN DI KECAMATAN BINTAN TIMUR, KABUPATEN BINTAN)	
Suherry, Nurul hafizah, Nurhadiyanti	1101
REFORMASI BIROKRASI POLITISASI BIROKRASI PADA PILKADA DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2015	
Fathur Rahman	1115
AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
Sakir, Diah Mutiara, M. Eko Atmojo, Riska Sarofah	1127
TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014	
Firmanto Latief	1146
REFORMASI BIROKRASI BIDANG PROMOSI JABATAN STUDI: PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	
Muhammad Eko Atmojo, Ady Muzwardi, Sakir	1161
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENURUNNYA KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK (STUDI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN)	
Ombi Romli	1175
BUDAYA BIROKRASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON	
Anwar Sadat	1195

MENYEMBUNYIKAN POLITIK UANG DIBALIK PILKADA SERENTAK KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN	1209
Elly Nurlia	
<i>OPINION LEADER</i> DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN POLITIK MASYARAKAT DESA DI INDONESIA	1220
Niken Lestsrini	
PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR PERIKANAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU	
Rizky Nanda Hidayat, Rendra Setyidharja, Zamzami A. Karim, Junriana	1225
REKRUITMEN POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI REKRUITMEN CALON LEGISLATIF DAERAH PAN KABUPATEN PONOROGO)	1241
Titin Sarwenda, Sulton	

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN

(Studi hadith-hadith Rasulullah tentang *al-imam* dan *al-Imamah*)

Nurul Iman
Staf Pengajar FAI Universitas Muhammadiyah Ponorogo
nuruliman1972@yahoo.co.id

ABSTRAK

Masalah kepemimpinan (*leadership*) menjadi persoalan yang signifikan pada dekade terakhir dalam hubungannya dengan kesuksesan sebuah organisasi pada level apapun. Kepemimpinan baik politik maupun non politik merupakan “kedudukan” yang memungkinkan seseorang untuk mengelola wewenang kekuasaan dalam rangka tujuan tertentu sesuai amanat yang diterimanya. Islam memiliki cara pandang tersendiri terhadap kepemimpinan. Kepemimpinan dianggap sebagai amanat, tanggung jawab, kesempatan beramal, pelayanan masyarakat dan bukan semata-mata sebagai kekuasaan, wewenang atau bahkan alat untuk melakukan penindasan dan kezaliman. Dalam makalah ini akan diuraikan konsep kepemimpinan Islam dengan fokus studi kajian hadith-hadith Rasulullah tentang *al-imam* dan *al-imamah*. Pembatasan kajian ini dimaksudkan agar diperoleh gambaran dasar yang menyeluruh tentang ajaran Islam berkenaan dengan kepemimpinan ini.

Kata kunci: *al-imam*; *al-Imamah*; etika; tanggung jawab kepemimpinan

PENDAHULUAN

Islam diyakini sebagai agama universal yang mengatur seluruh kehidupan seorang muslim. Islam yang merupakan petunjuk menuntut pemeluknya untuk mengaplikasikan ajarannya dalam kehidupan. Politik --yang berkaitan dengan kekuasaan dan negara-- sebagai bagian kehidupan tentunya tidak terlepas dari aturan Islam. Negara yang merupakan institusi politik sangat dibutuhkan sebagai wadah dan pelindung bagi mengaplikasikan ajaran-ajaran tersebut. Menurut al-Maududi, banyak kebijakan syariat Islam yang tidak dapat dilaksanakan kecuali jika ada negara, seperti halnya penegakan hukum pidana¹. Hanya saja dalam kenyataannya, masalah kekuasaan dan kepemimpinan masih menjadi materi yang terus diperdebatkan di kalangan pemikir hingga saat ini.

Sejarah mencatat bahwa persoalan pertama yang diperselisihkan sepeninggal Rasulullah (632 M) antara Muhajirin dan Anshar adalah masalah *imamah*² (kepemimpinan) atau kekuasaan politik. Masalah ini dapat diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar

¹ Abu A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam*, (Bandung: Mizan, 1995), 35.

² Nazih Ayubi, *Political Islam* (London: Routledge, 1991), 1.

sebagai khalifah pertama, tetapi masalah ini pula yang kemudian memecah belah umat Islam menjadi Ahl Sunnah, Syiah dan Khawarij, dan memakan korban terbunuhnya Ali bin Abi Thalib (661 H).

Pemikiran tentang politik Islam sejatinya telah dikenal di kalangan Fuqaha seperti Abu Hanifah (767 M) dan Imam Syafi'i (819 M). Corak pemikiran mereka masih bersifat legalistik normatif karena berakar pada teks-teks Al-Qur'an dan Sunnah. Unsur kesejarahan kemudian menjadi nampak pada abad ke V seperti dalam karya Ali Bin Muhammad al-Mawardi (450 H/1058 M). Pemikiran sosiologis historis dikemukakan oleh Abdurrahman bin Khaldun (1404 M).³

Makalah yang sederhana ini tidak akan membahas pemikiran para tokoh Islam tersebut, tetapi secara khusus akan menfokuskan kajian pada teks hadith-hadith Rasulullah berkenaan dengan masalah kepemimpinan politik khususnya dengan kata kunci *imam* dan *imamah*. Arah pembahasan ini dipilih untuk menyederhanakan konsep berpikir tentang politik dan kepemimpinan Islam berdasar pada petunjuk Rasulullah SAW.

LANDASAN TEORI

1. Pemimpin Dalam Islam Dan Karakteristiknya

Dalam Islam, terdapat berbagai istilah yang digunakan untuk menyebut pemimpin dan kepemimpinan. Terdapat kata *khalifah*, *imam*, *uli al-amri*, *wali*, dan *ra'in*, untuk menyebut pemimpin Islam. Dari ungkapan tersebut, lalu istilah kepemimpinan Islam disebut sebagai *khilafah*, *imamah*, *amr al-mukminin*, *wilayah*, dan *ri'ayah*.⁴

Secara bahasa *imam* menurut Anton Na'mah diartikan sebagai: *man ya'tamm bih al-nnas min rais aw ghairuh* (siapa yang diikuti oleh orang lain baik pemimpin atau selainya); atau *khalifah*; *syakhs yujassad matsalan a'la* (seseorang yang diperhitungkan sebagai panutan utama).⁵ Sedangkan Hans Wehr menyebut imam sebagai pemimpin (*leader*), pemimpin shalat, penguasa (*master*), dan garis tegak lurus (*plumb line*)⁶.

Definisi kebahasaan ini menegaskan bahwa imam atau pemimpin merupakan sosok panutan yang diperhitungkan dikarenakan kecakapan agama maupun kualitas

³ Abdul Muin Salim, *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: LSIK, 1994), 35.

⁴ M. Dian Supyan, *Kepemimpinan dalam Tafsir al-Misbah*, (Yogyakarta: IAIN Suka, 2013), 64-86

⁵ Anton Na'mah et.al. *al-Munjid fi al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 2001), 43.

⁶ Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Beirut: Librairie Du Liban, 1974), 25.

dirinya. Aspek kepemimpinan dalam shalat serta sifat pemimpin yang tegak lurus menjadikan pemimpin sebagai panutan yang disegani.

Dengan merujuk definisi etimologi tersebut, secara istilah pemimpin menurut M. Ahmad Lauh diartikan sebagai “seseorang yang dapat diikuti oleh orang lain, baik ia seorang kepala, tokoh panutan, imam shalat, khalifah, maupun panglima pasukan”⁷. Hal ini sesuai dengan hadist Rasulullah bahwa seorang pemimpin atau imam adalah sosok yang dapat diikuti. Lauh menambahkan bahwa lafal *al-imamah* secara sendiri tidak mengandung pujian atau celaan, hingga berhimpun kepadanya sifat lain. Karena itu sering dikatakan oleh ulama istilah *imam al-huda* (pemimpin penuh petunjuk) dan *imam al-dhalalah* (imam kesesatan).

Abdullah bin Abdul Muhsin al-Thariqi menyebut pemimpin dalam Islam memiliki aspek *ar-riayah al-'ammah* (otoritas umum) di dalam agama dan dunia sekaligus⁸. Karenanya siapa saja yang menjadi pemimpin, dialah pemimpin yang menjaga agama dan mengendalikan urusan dunia. Inilah tuntutan penting dalam kehidupan kaum muslimin.

Untuk menilai sebuah kepemimpinan dapat disebut sebagai *imam al-huda*, maka Muhadi Zainudin menyebut ciri kepemimpinan Islami, didasarkan kepada sistem dan cara yang dipraktekkan dalam memimpin seseorang⁹. Esposito menyebut bahwa prinsip umum tentang syarat minimal bagi kepemimpinan (pemerintahan) Islam adalah bersesuaiannya dengan syariah, bukan watak kepala negara. Hukum Islam adalah kriteria bagi legitimasi sebuah kepemimpinan (negara) Islam¹⁰.

S. al-Awa menambahkan bahwa prinsip-prinsip dasar yang harus dipenuhi oleh kepemimpinan Islam adalah: a) *al-Shura* (*mutual consultation*); b) keadilan (*justice*); c) kebebasan (*freedom*); d) persamaan (*equality*); e) pertanggungjawaban pemimpin dan ketaatan rakyat¹¹. Prinsip-prinsip tersebut merupakan *supreme values* yang mempunyai banyak pengaruh terhadap format konsep kepemimpinan (negara) Islam, fungsi-fungsinya, serta sistem pemerintahannya.

⁷ M. Ahmad Lauh, “al-Imamah wa Makanatuha fi al-Islam” dalam www.darmalo.com/spip.php?article_312 diakses 20 maret 2016.

⁸ Abdullah bin Abdul Muhsin al-Thariqi, *Al-Imamah fi al-Islam Usus wa Mabadi' wa Wajibat*, (Dubai: Maktabah al Malik Fahd, 1415)29.

⁹ Mahdi Zainuddin, *Studi Kepemimpinan Islam*, (Yogyakarta: al-Muhsin, 2002), 15-16.

¹⁰ John L. Esposito, *Islam dan Politik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), 41.

¹¹ Muhamed S. al-Awa, *On The Political of The Islamic State*, (Indiana: American Trust Publication, 1978), 83.

Selain prinsip-prinsip dasar yang dipegangi tersebut, kepemimpinan dapat berjalan sukses jika ditunjang oleh karakter kuat diri pemimpin. AF Djunaedi dengan merujuk pada teori Prijosaksono (2002) tentang Q Leader (IQ-EQ-SQ), menyebut aspek kepemimpinan yang baik menggabungkan aspek-aspek berikut: 1) Perubahan karakter dari dalam (*character change*); 2) Visi yang jelas (*clear vision*); dan 3) Kemampuan atau kompetensi yang tinggi (*competence*)¹². Ketiga karakter tersebut dilandasi dan didukung sikap disiplin yang tinggi untuk senantiasa tumbuh, berkembang baik secara internal (kemampuan intrapersonal, teknis, pengetahuan dan lainnya) maupun dalam hubungannya dengan orang lain (kemampuan interpersonal dan metode kepemimpinan).

METODE PENELITIAN

Kajian dalam makalah ini merupakan hasil penelitian yang bercorak kepustakaan (*library research*) dalam arti bahwa semua sumber datanya berasal dari bahan-bahan tertulis yang berkaitan dengan topic yang dibahas berupa buku-buku hadits. Data-data yang berhasil dihimpun tentang hadits-hadith bertema *al-imam* dan *al-imamah* diinterpretasi kualitatif untuk selanjutnya dibuat generalisasi. Penyajian data dilakukan secara deskriptif kualitatif, setelah itu baru diambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

1. Hadits-hadits Nabi Tentang *al-Imam* dan *al-Imamah*

Berdasar penelusuran pustaka terhadap hadits-hadith tentang *al-imam* dan *al-imamah*, ditemukan lebih dari lima puluh hadits. Hanya saja kajian hadits dalam makalah ini difokuskan pada enam buah hadits berikut:

1. Hadits Kesatu

(إنما الإمام جُنَّةٌ؛ يُقَاتِلُ مَنْ ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل، فإن له بذلك أجراً، وإن أمر بغيره، فإن عليه وزراً)؛
متفق عليه

“*Sesungguhnya imam itu ibarat perisai, yang berperang dan berlindung di belakangnya. Jika dia memerintah dengan ketakwaan kepada Allah dan berbuat adil, maka baginya*

¹² AF. Djunaedi. “Filosofi dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam” dalam *Al-Mawardi* (Yogyakarta: UII, 2005), 56

pahala. Jika dia memerintah dengan selain itu, maka ia akan ditimpa dosa". (Muttafaq 'Alaih)

2. Hadits Kedua

(ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يُفطر، والإمام العادل، ودعوة المظلوم، يرفعها الله فوق الغمام، ويفتح لها أبواب السماء، ويقول الرب: وعزتي لأُنصرتك ولو بعد حين)؛ أخرجه الترمذي، وأحمد

"Tiga golongan yang tidak ditolak permohonannya oleh Allah: Seorang yang berpuasa hingga ia berbuka; imam yang adil; dan doa seorang yang terdholimi. Allah akan mengangkatnya diatas diatas awan dan membukakan pintu-pintu langit. Allah lalu berfirman: "Dan demi keagunganKu. Aku sungguh akan menolongnya walau sesudah beberapa saat". (HR. Tirmidzi dan Ahmad)

Hadit ini menegaskan bahwa diantara golongan yang tidak dapat ditolak doanya oleh Allah SWT adalah seorang yang berpuasa, imam yang adil, serta orang yang teraniaya (termasuk rakyat kecil). Allah bahkan bersumpah untuk memastikan pertolonganNya bagi ketiga golongan tersebut.

3. Hadits Ketiga

(ما من أميرٍ يلي أمر المسلمين، ثم لا يجهد لهم وينصح، إلا لم يدخل معهم الجنة) أخرجه مسلم

"Barang siapa yang memikul kepemimpinan kaum muslim, kemudian ia tidak bersungguh-sungguh dan membela urusan mereka, ma tidak ia masuk surga bersama mereka" (HR. Muslim)

Hadits ini menegaskan bahwa kepemimpinan merupakan tanggung jawab yang seharusnya ditunaikan dengan penuh kesungguhan. Rasulullah menyebut pemimpin yang abai terhadap kenyataan ini, tidak diperkenankan masuk surga bersama mereka yang dipimpinya.

4. Hadits Keempat

قا رسول الله لأبي ذر -رضي الله عنه- في الإمارة: (إنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها)؛ أخرجه مسلم

Rasulullah bersabda kepada Abu Dzarr: *"Sesungguhnya kepemimpinan itu adalah amanat, dan di hari kiamat akan menjelma menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali orang yang menunaikannya dengan penuh tanggungjawab"* (HR. Muslim)

Sunnah Rasul telah menunjukkan bahwa kepemimpinan merupakan amanat yang wajib ditunaikan. Jika tidak ditunaikan, amanat kepemimpinan menjadi penyebab kehinaan

dan penyesalan. Sebaliknya jika dapat ditunaikan, maka ia akan mengantarkan kepada kemuliaan dan kejayaan, didunia dan akhirat.

5. Hadist Kelima

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " أربعة يبغضهم الله: البياح الحلاف، والفقير المختال، والشخص الزاني؛ والإمام الجائر «هذا حديث حسن أخرجه النسائي في» سننه

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: *“Empat golongan yang dibenci Allah: Penjual yang banyak sumpah; Fakir yang sombong; Orang tua yang berzina; Imam yang berbuat aniaya”* (HR. Nasai)

Dalam hadits tersebut terdapat larangan bagi imam untuk berbuat aniaya. Jika tidak, maka ia akan bergabung ke dalam golongan yang dibenci Allah bersama penjual yang mengumbar sumpah, fakir yang sombong, serta orang tua pezina.

6. Hadits Keenam

(ما من إمام أو والٍ يعلق بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة، إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكنته)؛ صحيح؛ أخرجه أحمد.

“Tidaklah terdapat seorang pemimpin atau penguasa yang menutup pintu rumahnya dari (rakyat) yang memiliki kebutuhan, papa, dan miskin, kecuali Allah akan menutup pintu langitnya ketika ia butuh dan miskin”. (HR. Ahmad)

Dalam hadits ini, menurut al-Mubarakfuri dalam *Tuhfatul al-Ahwadzi*, Allah akan memberikan penolakan (*ihitjab*) terhadap kebutuhan seorang pemimpin jika ia enggan dan menghindar dalam memenuhi kebutuhan rakyatnya. Penyebutan *al-hajah, al-khullah, dan al-maskanah* yang *nota bene* berdekatan maknanya tersebut merupakan bentuk *ta'kid* dan penekanan terhadap ancaman Allah tersebut¹³.

2. Etika Dan Tanggung Jawab Kepemimpinan Menurut Hadits Nabi

Dari uraian terhadap hadits-hadits tersebut tersebut dapat dipahami beberapa hal berikut ini:

1. Seorang pemimpin haruslah adil dan melindungi rakyatnya. Keadilan merupakan syarat diperolehnya pahala, dan sebaliknya ketidakadilan hanya akan mengundang datangnya dosa.

¹³ Muhammad ‘Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri, *Tuhfat al-Akhwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzi*, (Beirut: Darul Fikri, 2008), 469.

2. Seorang pemimpin yang adil akan diperkenankan doanya oleh Allah dan tidak akan ditolak permohonannya.
3. Seorang pemimpin harus bersungguh-sungguh dalam bekerja dan membela kepentingan kaum muslimin dan rakyatnya.
4. Seorang pemimpin dilarang untuk berbuat aniaya dan kedhaliman.
5. Seorang pemimpin dilarang untuk mengambil “jarak” dan menghindar dari problematika rakyatnya.

Petunjuk dan ajaran dari hadits tersebut jika diperhatikan menegaskan tentang tanggung jawab seorang pemimpin dalam Islam dalam memberikan layanan bagi rakyat. Karena itu dikenal istilah “*sayyid al-qaumi khadimuhum*” yang berarti bahwa pemimpin suatu komunitas sejatinya adalah pelayan yang berusaha memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan problematika mereka.

Dengan adanya sikap Islam terhadap kepemimpinan tersebut tidak berlebihan jika kepemimpinan dan kekuasaan dipandang sebagai alat dan bukan tujuan. Kepemimpinan menjadi sara bagi penegakan nilai-nilai agama serta terciptanya kesejahteraan sosial. Kepemimpinan bahkan dapat berfungsi sebagai media dakwah jika mengindahkan nilai-nilai Islam. Karena itu, penulis sependapat dengan Amin Rais bahwa tidak ada sekularisasi dalam politik Islam, meskipun menurut sebagian orang sekularisasi dianggap proses yang mau tidak mau harus membarengi modernisasi. Sekularisasi yang salah satu komponennya adalah “desakralisasi politik” akan menghapuskan legitimasi sakral (termasuk agama) atas otoritas kekuasaan¹⁴. Najih Ayubi menambahkan bahwa sekularisme merupakan fenomena yang tidak ada relevansinya dengan sejarah Islam dikarenakan dua hal. Pertama, Islam tidak memiliki gereja dan sistem hirarki kependetaan. Kedua, agama Kristen berisi pokok-pokok kepercayaan, sedangkan Islam berupa sistem syariat menyeluruh yang mencakup urusan ibadah dan muamalah. Karenanya, Islam identik dengan *way of life* dan bukan hanya sebagai agama akhirat (*din al-akhirah*). Dalam Kristen hanya terdapat sedikit peraturan yang mengorganisasikan urusan sosial dan ekonomi baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat¹⁵.

Dengan menjadikan politik sebagai alat bagi penegakan nilai-nilai agama, pemenuhan kesejahteraan sosial, dan media dakwah, maka seorang muslim akan memandang kekuasaan,

¹⁴ M. Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 28.

¹⁵ Najih Ayubi, *Political Islam*, (London: Routledge, 1991), 45-49.

pengaruh, posisi politik, sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang sesungguhnya, yakni pengabdian kepada Allah dan *lii'lai kalimatillah* (meninggikan agama Allah).

KESIMPULAN

Islam adalah agama paripurna yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk kepemimpinan dan politik. Dari kajian terhadap hadith-hadith Rasulullah tentang *al-imam* dan *al-imamah* terdahulu dapat dipahami bahwa pemimpin dalam Islam pelayan bagi kepentingan rakyatnya. Khalifah yang merupakan pemimpin politik tertinggi bahkan menyebut dirinya sebagai *amir al-mukminin* (suruhan kaum mukmin). Kepemimpinan merupakan amanat rakyat yang harus ditunaikan sebaik-baiknya.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, keadilan menjadi pokok persoalan yang selalu harus dikedepankan. Sebaliknya kedzaliman atau aniaya, haruslah dihindari.

Segala perencanaan, tindakan, dan keputusan seorang pemimpin seharusnya dicermati apakah memang telah mencerminkan keadilan. Rasul menegaskan bahwa pahala dan dosa yang akan didapat pemimpin, bergantung pada sejauhmana prinsip keadilan ini ditegakkan.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Awa, Muhamed S. 1975. *On The Political of The Islamic State*. Indiana: American Trust Publication.
- al-Maududi, Abu A'la, 1995. *The Islamic Law and Constitution*, terj. Asep Hikmat, *Sistem Politik Islam*. Bandung: Mizan.
- Al-Mubarakfuri, Muhammad 'Abdurrahman bin Abdurrahim, 2008. *Tuhfat al-Akhwadzi Syarh Sunan al-Tirmidzi*. Beirut: Darul Fikri.
- al-Thariqi, Abdullah bin Abdul Muhsin, 1415. *Al-Imamah fi al-Islam Usus wa Mabadi' wa Wajibat*. Dubai: Maktabah al Malik Fahd.
- Ayubi, Nazih, 1991. *Political Islam*. London: Routledge.
- Djunaedi. AF. 2005. "Filosofi dan Etika Kepemimpinan Dalam Islam" dalam *Al-Mawardi*. Yogyakarta: UII.
- Esposito, John L. 1990. *Islam dan Politik*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Lauh, M. Ahmad, 2016. "al-Imamah wa Makanatuhah fi al-Islam" dalam www.darmalo.com/spip.php?article312 diakses 20 maret 2016.
- Na'mah, Anton et.al. 2001. *al-Munjid fi al-Lughah al-Arabiyah al-Mu'ashirah*, Beirut: Dar al-Masyriq.
- Rais, M. Amin, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan, 1994), 28.
- Salim, Abdul Muin. 1994. *Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: LSIK.
- Supyan, M. Dian, 2013. *Kepemimpinan dalam Tafsir al-Misbah*, Yogyakarta: IAIN Suka.
- Wehr, Hans, 1974. *A Dictionary of Modern Written Arabic*. Beirut: Librairie Du Liban.
- Zainuddin, Mahdi, 2002. *Studi Kepemimpinan Islam*. Yogyakarta: al-Muhsin.



MUHAMMADIYAH UNIVERSITY
OF PONOROGO

REKTORAT



9 772502 783002